

## Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Adrianus Rian<sup>1)</sup>, Zainal Fatah<sup>2)</sup>, Eny Haryati<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: adrianusrian1999@gmail.com

### ABSTRAK

Pengembangan pariwisata berfungsi sebagai *leading sector* baru atau mesin baru penggerak perekonomian daerah. Sehingga pariwisata seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata (Wisata Bahari Tlocor) telah menurun selama beberapa tahun terakhir akibat kurangnya promosi, beberapa wahana, fasilitas, dan layanan yang mulai gagal serta tidak dapat digunakan lagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengungkap keadaan sebenarnya yang mungkin tersembunyi Moleong (2006). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wisata Tlocor merupakan tempat pemberhentian perahu yang digunakan penyeberangan sungai menuju Pulau Lusi yang menghadap ke pesisir pantai. Wisata alam juga menyuguhkan panorama sungai yang tenang, dengan beberapa perahu dan *speed boat* tertambat di dermaga. Sebuah kendaraan laut yang siap membawa wisatawan ke Pulau Lusi dan daya tarik wisata yang disuguhkan juga adalah pemandangan mangrove dan Pulau Lusi. Pulau Lusi merupakan pulau baru yang terbentuk akibat endapan lumpur lapindo yang mengalir ke Sungai Porong, Selama hampir tujuh tahun, lumpur yang tergenang tersebut dibuang ke Kali Porong, dimana arus sungai membawa lumpur tersebut dan membentuk pulau baru di Pantai Timur Sidoarjo. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya wisatawan yang mengunjungi Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh kurangnya promosi, beberapa wahana, fasilitas, dan layanan yang mulai gagal serta tidak dapat digunakan lagi, dan kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melestarikan potensi ekowisata.

**Kata Kunci:** Pengembangan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian Daerah

### Abstract

*Tourism development functions as a new leading sector or a new engine driving the regional economy. So tourism should be a priority in regional development. The number of tourists visiting tourist attractions (Tlocor Marine Tourism) has decreased over the last few years due to lack of promotion, some rides, facilities and services are starting to fail and can no longer be used. This research uses a qualitative approach with the aim of uncovering true situations that may be hidden by Moleong (2006). The results of this research show that Tlocor Tourism is a stopping place for boats used to cross the river to Lusi Island which faces the coast. Nature tourism also offers panoramic views of a calm river, with several boats and speed boats moored at the pier. A sea vehicle is ready to take tourists to Lusi Island and the tourist attraction it offers is the view of the mangroves and Lusi Island. Lusi Island is a new island formed by Lapindo mud deposits that flowed into the Porong River. For almost seven years, the stagnant mud was dumped into the Porong River, where the river current carried the mud and formed a new island on the East Coast of Sidoarjo. Several factors that influence the decline in tourists visiting Tlocor Marine Tourism in Kadungpandan Village, Jambon District, Sidoarjo Regency are caused by a lack of promotion, several rides, facilities and services that are starting to fail and can no longer be used, and a lack of community participation in preserving the potential. ecotourism.*

**Keywords:** Tourism Development, Community Empowerment, Regional Economy

## A. LATAR BELAKANG

Kepariwisata merupakan industri yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembangunan kepariwisataan menjadi hal yang perlu diperhatikan karena faktor inilah yang akan menentukan arah dan masa depan kepariwisataan bagi masyarakat atau komunitas. Pengembangan pariwisata berfungsi sebagai *leading* sektor baru atau mesin baru penggerak perekonomian daerah. Sehingga pariwisata seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Pengembangan sektor pariwisata sangat prospektif, karena berpeluang menjadikan potensi daerah sebagai modal dasar berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Menurut Suwanto (2004), pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mendorong sektor produktivitas lainnya dan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan taraf hidup. Industri pariwisata Indonesia kuat dan populer, berperan sebagai “penyelamat” bagi masyarakat, “prospek primadona” bagi perekonomian, dan alat pembangunan nasional. Semua pihak kini sepakat bahwa pariwisata berperan penting dalam mendongkrak cadangan devisa masyarakat, daerah, dan bangsa. Hampir setiap bangsa di dunia menyadari hal ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata guna menarik lebih banyak wisatawan atau pengunjung.

Kabupaten Sidoarjo kini dianggap sebagai penyangga utama Surabaya. Potensi pariwisata Kabupaten Sidoarjo karena merupakan salah satu daerah yang paling padat penduduknya di Jawa Timur dan memiliki banyak potensi pariwisata. Sidoarjo sebagai kota penyangga harus berdemonstrasi dan menggali sekali lagi potensi pariwisata karena kebutuhan akan daya tarik wisata saat ini menjadi bagian yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat pada 2021. Jumlahnya mencapai 887.000 orang.

Diperkirakan jumlah itu akan meningkat menjadi 904/seribu orang tahun ini. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (Kepala BPS Jatim) Dadang Hardiwan mengatakan jumlah kunjungan wisman pada 2021 sebanyak 689 kunjungan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ketika 35,035 persen kunjungan tercatat, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 98,03 persen.

Salah satu jenis ekowisata yang sedang berkembang Kabupaten Sidoarjo adalah Wisata Bahari yang letaknya di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Objek wisata ini sudah dioperasikan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2011, dan masyarakat saat ini menjalankannya melalui Pokdarwis. Daya tarik utama Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah Pulau Lusi, dan mengambil tur perahu dari dermaga Tlocor ke sekitar pulau sedimen Lumpur "Lapindo" Sidoarjo atau Pulau Lusi. Pulau Lusi adalah singkatan dari "Mudpur Sidoarjo" yang merupakan pulau buatan hasil dari pengerukan di Sungai Porong yang dilakukan oleh badan pelaksanaan Lumpur Lapindo bertujuan agar endapan lumpur tetap stabil dan menyatu dengan perairan serta tidak menimbulkan pendangkalan sungai. Selama hampir 7 tahun, lumpur tersebut dibuang ke Sungai Porong, kini membentuk hamparan pulau buatan di tepi timur Sidoarjo.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir. Pasal 1 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu perorganisasian perencanaan, pemanfaatan pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antara sektor, antara *ecosystem* darat dan laut.

Mengingat latar belakang sebelumnya peneliti tertarik dan berkeyakinan perlu untuk mengkaji dan/atau melakukan penelitian tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Teori Pariwisata**

Secara teori, pengembangan adalah proses membuat perubahan yang direncanakan pada suatu wilayah atau daerah, antara lain dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, pengembangan memerlukan perencanaan yang matang, secara alami hal itu terkait dengan industri pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan daerah atau regional. Sederhananya, pengembangan pariwisata adalah proses pencocokan dan penyesuaian secara terus menerus dari sisi penawaran dan permintaan pariwisata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nuryanti, 1994).

### **2. Konsep Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut menjadi lebih baik dan lebih menarik secara tata ruang. Serta objek-objek di dalamnya sehingga dapat membangkitkan minat wisatawan yang mengunjunginya. Alasan utama pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata baik lokal maupun regional atau nasional Pembangunan ekonomi suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah dan negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat masyarakat bagi banyak.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi landasan bagi terselenggaranya pembangunan pariwisata nasional; diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga lingkungan; pengelolaan yang baik; terintegrasi antar aktor dan sektor di daerah, serta dengan mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Dengan kata lain,

masyarakat miskin hanyalah produk sampingan dari pembangunan (Nasikun, 1988).

Menurut Yoeti (2008), pariwisata dianggap sebagai sektor ekonomi alternatif yang berpotensi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini juga diyakini berpotensi tidak hanya menjadi sektor andalan dalam upaya meningkatkan cadangan devisa negara tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan utama pembangunan pariwisata adalah membangun dan memanfaatkan daya tarik wisata seperti kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna yang beraneka ragam, berbagai macam seni budaya dan tradisi, serta peninggalan purbakala. Empat komponen utama upaya pengembangan pariwisata diantaranya membuat dan menegakkan peraturan, mengembangkan fasilitas pariwisata utama dan pendukung, berinvestasi dalam kebijakan pariwisata, serta perencanaan kawasan pariwisata.

Menurut Inskeep & Gunn (1994), suatu kawasan wisata akan berhasil jika aspek-aspek yang paling mendasar dilakukan secara efektif, antara lain melestarikan lingkungan alam, meningkatkan kesejahteraan umum penduduk setempat, memastikan pengunjung senang, dan meningkatkan integrasi, serta pertumbuhan unit masyarakat di dalam kawasan dan zona pengembangannya.

### **3. Potensi Pariwisata**

Menurut Sugiyono (2013:409), potensi adalah segala sesuatu yang akan memberikan nilai tambah apabila dimanfaatkan. Dalam hal ini potensi tersebut ada pada industri pariwisata. Potensi untuk menarik wisatawan dan dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi tersebut dapat berasal dari kenampakan alam yang dimiliki oleh lokasi tersebut atau dari manusia membuat objek atau penampilan. Pearce (dikutip oleh Subhani (2010):12) kemudian menyebutkan faktor-faktor lokasi berikut

yang memengaruhi pertumbuhan potensi wisata ojek, diantaranya:

- a) Kondisi fisik meliputi iklim (atmosfer), tanah, batuan dan morfologi (litosfer), hidrosfer, serta flora dan fauna yang semuanya berdampak pada pariwisata.
- b) Atraksi dan hal-hal yang dilakukan. Segala sesuatu yang menarik orang ke suatu daerah tertentu seperti kesenian daerah, upacara adat, tarian, dan lain-lain adalah daya tarik wisata. Wisata ojek meliputi segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan dan berfungsi sebagai daya tarik untuk pengunjung.
- c) Aksesibilitas, yang terkait dengan inisiatif untuk menciptakan daya tarik wisata. Semakin mudah diakses suatu lokasi, semakin banyak wisatawan yang ingin pergi ke sana.
- d) Lokasi, bentuk, dan arah tempat wisata dapat dipengaruhi oleh kepemilikan dan penggunaan tanah, khususnya oleh variasi penguasaan dan kepemilikan. Contoh penguasaan tanah diantaranya tanah pribadi, tanah negara atau pemerintah, dan tanah masyarakat.
- e) Sarana dan prasarana bagi wisatawan, khususnya bagaimana kemudahan wisatawan untuk mencapai tempat wisata.
- f) Masyarakat, khususnya peran pemerintah melalui instansi terkait ketika menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan masyarakat sadar wisata. Hal ini karena potensi obyek wisata muncul sebagai akibat dari suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia, alam dan sebagai akibat.

Segala sesuatu di daerah tujuan wisata yang membuat orang ingin pergi ke sana dianggap memiliki potensi wisata. Dalam istilah awam, potensi wisata suatu lokasi adalah kapasitasnya untuk menampung pengunjung yang memperhatikan aksesibilitas, kualitas sumber daya, interpretasi sumber daya, dan faktor lainnya. Keseluruhan latar belakang alam, budaya,

sejarah, dan sosial ekonomi bagi terselenggaranya kegiatan pariwisata di suatu wilayah tertentu adalah definisi potensi pariwisata.

#### 4. Sistem Kepariwisata

Sistem pariwisata menurut Jordan (dalam Leiper, 2004:48) adalah urutan atau tatanan komponen dalam industri pariwisata dimana masing-masing komponen saling berhubungan dan membentuk sesuatu yang bersifat menyeluruh. Sedangkan Bertalanffy (dalam Leiper, 2004:48) mendefinisikan sistem sebagai satu kesatuan elemen yang saling terkait satu sama lain didalamnya dan dengan lingkungannya.

Secara sistematis, pariwisata dipandang sebagai kerangka kerja yang menyatukan upaya teoritis dan praktis untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan wisatawan selama mereka melakukan perjalanan. Kegiatan pariwisata ini sangat dinamis dan kompleks karena melibatkan banyak kelompok kunci yang terhubung dengan satu sama lain. Selain itu, melibatkan banyak sektor yang saling berkontribusi sesuai dengan peran dan fungsinya. Segala sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung adalah daya tarik wisata. Untuk dapat menarik pengunjung, setiap daerah tujuan wisata harus memiliki daya tarik.

Menurut Muljadi (2012), agar suatu daerah dapat menarik wisatawan harus memiliki daya tarik tersendiri. memiliki daya tarik tersendiri yang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan ketika memiliki daya tarik wisata yang kuat. Menurut Ismayanti (2010), daya tarik wisata dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a) Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti flora, fauna, keindahan alam, dan lain-lain.
- b) Daya tarik wisata hasil karya manusia, seperti pertunjukan seni budaya, film, museum, dan sebagainya.

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan

untuk berkunjung adalah daya tarik wisata. Untuk dapat menarik pengunjung, setiap daerah tujuan wisata harus memiliki daya tarik. Menurut Muljadi (2012), agar suatu daerah dapat menarik wisatawan harus memiliki daya tarik tersendiri yang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan ketika memiliki daya tarik wisata yang kuat.

## 5. Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Bagi masyarakat lokal, manfaat pariwisata berbasis masyarakat dipandang sebagai alat dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong partisipasi local. Pariwisata berbasis masyarakat dipromosikan sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal (Hamzah, 2014).

*Community Based Tourism* muncul sebagai bentuk alternatif dalam pengembangan pariwisata yang ditujukan untuk menangkalkan pariwisata massal. Salah satu aspek penting yang sering dilupakan adalah perspektif pengunjung tentang pariwisata berbasis masyarakat. Kepuasan pengunjung adalah elemen penting dari keberlanjutan perusahaan bisnis. Pelanggan yang puas tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak, dan ketika mereka pulang, mereka merekomendasikan tempat tujuan kepada teman-teman mereka.

Menurut López-Guzmán et al. (2011), *Community Based Tourism* (CBT) didasarkan pada partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk penciptaan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat mendukung seluruh aktivitas pariwisata. Di sisi lainnya, sangat penting untuk membantu menciptakan hubungan antara masyarakat setempat dengan pengunjung, CBT didasarkan pada penciptaan produk wisata yang ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di suatu kawasan wisata. Pedrana (2016) menjelaskan bahwa elemen penting untuk pengembangan suatu daerah dalam upaya pembangunan ekonomi lokal

bisa dimulai dengan memberdayakan pengusaha lokal (*entrepreneur*), investasi lokal, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Rahayu et al. (2015), *Community Based Tourism* adalah bentuk pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sebagai kelompok yang independen dan mampu mengambil keputusan.

Partisipasi masyarakat lokal merupakan pijakan awal terhadap berbagai dampak strategis yang terkait dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi pencapaian desa wisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi desa wisata yang berkualitas. Menurut Trejos, dkk. (2008) masyarakat lokal harus memiliki kendali dan berbagi manfaat secara adil. Selama ini, dalam literatur dan studi tentang proyek berbasis komunitas dalam pariwisata di seluruh dunia, banyak contoh kegiatan pariwisata dalam komunitas yang seolah-olah milik komunitas lokal meskipun diprakarsai oleh orang luar (Jones, 2005). Hal ini karena tidak jelas kriteria apa yang dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah pengembangan pariwisata dikategorikan berbasis masyarakat atau tidak (Giampiccoli & Mtapuri, 2016).

## 6. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk meningkatkan harga diri, terutama di kalangan mereka yang miskin dan tidak berdaya. Seseorang yang diberdayakan menunjukkan bahwa ia telah mencapai kemandirian. Oleh karena itu, langkah pertama dalam memberdayakan seseorang atau komunitas adalah memberikan akses atau pengaturan di mana potensi masyarakat dapat diwujudkan. Sebagai hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, pajak yang mereka bayarkan pasti juga besar, yang akan meningkatkan pendapatan daerah.

Ada tiga tahapan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat dan ketiga tahapan serta proses tersebut juga dapat

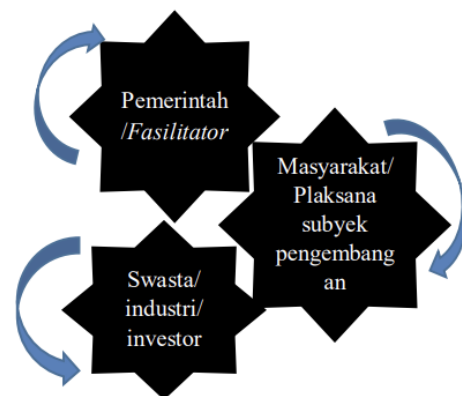
dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui hasil dari proses pemberdayaan masyarakat (Tjokrowinoto, 1998), yaitu:

- a) Pemberdayaan yang berfokus pada upaya untuk menciptakan, menginspirasi, mendorong, dan memfasilitasi swadaya bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Dari sudut pandang ini, pemberdayaan lebih merupakan upaya untuk mendidik masyarakat tentang perlunya memperbaiki keadaan mereka, yang merupakan inti dari peningkatan keberdayaan. Hal ini penting karena tidak semua orang yang tidak berdaya atau dalam suatu komunitas menyadari ketidakberdayaan mereka.
- b) Pemberdayaan yang berfokus pada membantu, mengarahkan, memfasilitasi, dan mendidik mereka yang kurang berdaya agar dapat membantu dirinya sendiri. atau kapasitas masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang dapat mengubah keadaan mereka dari keadaan sekarang menjadi lebih baik, dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan. Pada titik ini dalam proses pemberdayaan, penekanannya adalah pada pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas, kompetensi bangunan, dan sebagainya.
- c) Masyarakat seharusnya sudah dapat melihat dan merasakan hasil dari pemberdayaan, yang diukur dengan berkembangnya kemauan dan kapasitas masyarakat untuk pembangunan mandiri. Dalam settingan, masyarakat yang tidak memiliki anggota yang berdaya dalam pada awalnya, telah mengalami transformasi keadaan hingga pada saat bantuan dari sumber luar dihentikan, masyarakat sudah memiliki kapasitas dan ketahanan untuk berkembang secara mandiri (khususnya) guna memenuhi kebutuhannya.

Tiga tahapan pemberdayaan menjadi acuan karena pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pertumbuhan desa wisata lebih dicermati dari kapasitas

swasembada masyarakat. Mentalitas tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi masyarakat yang mau menolong dirinya sendiri, masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri, dan masyarakat yang mampu berkembang.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya penguatan kekuasaan atau pemberdayaan kelompok masyarakat yang tidak berdaya, biasanya mereka yang tergolong marginal dalam masyarakat. Menurut Adimihardja dalam Sunaryo (2013). Dalam pariwisata, ada beberapa kelompok yang memainkan peran berbeda dalam mewujudkan perjalanan. Gambar 2.1. di bawah ini menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan pariwisata (Sunaryo, 2013: 217).



**Gambar 2.1. Ilustrasi Pemangku Kegiatan**

(Sumber: Sunaryo, 2017)

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pola rantai hubungan yang saling terkait dalam penyelenggaraan pariwisata. Perlu ada keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta dalam mendukung peran partisipasi masyarakat sebagai tujuan pembangunan kepariwisataan. Sunaryo (2013) menyatakan bahwa prinsip tata kelola pariwisata yang baik adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada, serta sinergi (integrasi dan timbal balik) antara pemerintah, swasta, atau industri pariwisata penguatan,

menunjukkan bahwa itu adalah dimasukkannya partisipasi aktif dan masyarakat terkait.

## **7. Teori Pola Pengelolaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa secara teori pola pengelolaan yang menerapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat dengan mudah dikenali dari berbagai ciri pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### **a) Partisipasi Masyarakat Terkait**

Masyarakat lokal memantau atau mengelola yang ada pengembangan pariwisata dengan berpartisipasi dalam menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan pariwisata; dan mengidentifikasi sumber daya untuk dilindungi, dikembangkan, dan digunakan untuk pengembangan serta pengelolaan daya tarik wisata. dibutuhkan. Pemerintah daerah juga harus berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

### **b) Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan**

Terlibat secara aktif dan produktif dalam pengembangan pariwisata, termasuk kelompok LSM dan lembaga di bidang pariwisata (lembaga swadaya masyarakat), kelompok relawan, pemerintah daerah, asosiasi industri pariwisata, asosiasi perdagangan dan pemangku kepentingan berpengaruh lainnya Peserta dan pemangku kepentingan yang membutuhkan, seperti mereka yang manfaat dari kegiatan pariwisata.

### **c) Kemitraan Kepemilikan Lokal**

Pembangunan pariwisata harus mampu menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat lokal. Perusahaan yang mendukung fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, souvenir, dan transportasi pariwisata. Ini

harus dikembangkan dan dipelihara dengan masyarakat setempat melalui model kemitraan strategis.

### **d) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut**

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Artinya, aktivitasnya harus menghindari eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan tidak dapat diubah. Ketika diimplementasikan, program pengembangan pariwisata harus memastikan bahwa sumber daya alam dan buatan manusia dapat dilindungi dan ditingkatkan sesuai dengan standar internasional dan norma.

### **e) Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat**

Aspirasi dan tujuan masyarakat harus dimasukkan dalam program kegiatan wisata untuk menciptakan kondisi yang harmonis antara wisatawan, bisnis, dan masyarakat lokal dapat terlayani dengan baik. Misalnya, mulai dari perencanaan hingga operasional dan pemasaran bisa kita tangani, seperti kerja sama pengembangan atraksi wisata budaya dan kemitraan wisata budaya.

### **f) Daya Dukung Lingkungan**

Daya dukung dalam pengembangan Kepariwisata meliputi kelestarian fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus wajar dan konsisten dengan batas kapasitas lokal dan kelestarian lingkungan yang ada.

### **g) Monitor dan Evaluasi Program**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam program pembangunan pariwisata berkelanjutan mulai dari menyusun pedoman, menilai dampak kegiatan pariwisata, mengembangkan indikator dan batasan untuk mengukur dampak pariwisata, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan.

h) Akuntabilitas Lingkungan

Perhatian besar harus selalu diberikan pada kesempatan untuk mencari pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat ketika merencanakan program pengembangan pariwisata. Hal ini jelas tercermin dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan pariwisata yang ada.

i) Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan pariwisata berkelanjutan selalu memerlukan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan keterampilan usahanya secara profesional.

j) Promosi dan Advokasi

Nilai-nilai budaya lokal pengembangan pariwisata berkelanjutan juga membutuhkan program promosi dan advokasi penggunaan lahan, dan kegiatan yang meningkatkan karakter lanskap (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat lokal. Kegiatan dan penggunaan lahan ini harus bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata berkualitas yang memuaskan pengunjung dan wisatawan. Pariwisata yang dapat menarik perhatian dengan mengembangkan daya tarik tersendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata adalah suatu tempat yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa kekayaan alam, budaya, dan buatan manusia, yang menjadi maksud atau tujuan kunjungan wisatawan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata terutama harus berfokus pada hal-hal berikut, sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata diantaranya meningkatkan kemampuan, peran, dan inisiatif masyarakat pengembangan pariwisata; meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat ke tingkat yang lebih

tinggi; meningkatkan nilai kesejahteraan ekonomi masyarakat-meningkatkan manfaat dari pengembangan pariwisata; serta memudahkan masyarakat untuk berwisata.

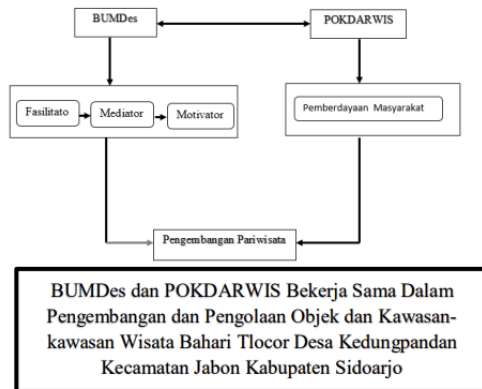
Sunaryo (2013) melanjutkan, strategi pengembangan pariwisata saat ini memasukkan pemberdayaan masyarakat sebagai isu dalam pengembangan pariwisata. Taktik ini disebut sebagai *Community Based Tourism* (CBT) dalam bidang ilmu pariwisata. *Community Based Tourism*, juga dikenal sebagai pariwisata berbasis masyarakat, pada prinsipnya merupakan salah satu konsep mendasar dan signifikan dalam pengembangan teori pembangunan.

Akibat banyak mendapat kritikan, hak-hak terabaikan dan masyarakat lokal dikucilkan dari kegiatan pariwisata di suatu destinasi. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata merupakan prinsip dasar pariwisata berbasis masyarakat, yang berupaya memaksimalkan pendapatan masyarakat. partisipasi dalam pariwisata dan manfaatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (lokal) harus menjadi tujuan utama pembangunan pariwisata.

Menurut Murphy (dalam Sunaryo, 2013), sumber daya dan keunikan masyarakat lokal, baik fisik maupun non-fisik (tradisi dan budaya) sangat penting untuk pengembangan pariwisata. Pentingnya hubungan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, dalam konteks pariwisata pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Boley dan 12 teman lainnya). Masyarakat lokal harus terlibat secara terpusat dalam proses pengembangan pariwisata. Keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai jika masyarakat lokal memiliki kendali tertentu atas proses pembangunan dan bahwa mereka berbagi secara adil dan manfaat yang muncul dari kegiatan pariwisata.



## 8. Kerangka Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo



**Gambar 2.2. Kerangka Konsep Pengembangan Pariwisata**  
 (Sumber: Data diolah penulis)

## 9. Peran BUMDes Sebagai Aktor Kelembagaan

Peran BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.

Menurut (Prasetyo, 2018) peran BUMDes terdiri atas:

- a) BUMDes sebagai fasilitator yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa.
- b) BUMDes sebagai mediator yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk

merealisasikan hasil-hasil usaha rencana usaha yang sudah ditetapkan.

- c) BUMDes sebagai motivator, peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang BUMDes selanjutnya supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.

## 10. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Sebagai Aktor Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Pokdarwis merupakan elemen pemangku kepentingan masyarakat yang tentunya berperan strategis atau penting dalam mengembangkan dan mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerah untuk menjadi tujuan wisata. Keterlibatan masyarakat untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki sendiri merupakan kontribusi yang besar dan berpotensi untuk menjadi tujuan wisata. Juga, dengan melibatkan masyarakat Proses dan usaha pengembangan pariwisata begitu penting. Sehingga dari masyarakat itu sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga potensi sumber daya alam yang ada.

Masyarakat sebagai elemen kunci pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berperan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata yang tepat sasaran mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya atau ekonomi masyarakat. Peran masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan budaya yang dimilikinya menempati proporsi yang signifikan dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk pengembangan desa wisata. Agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, kelestarian alam. Prinsip tata kelola

pariwisata yang baik pada dasarnya adalah: Adanya integrasi koordinasi pemangku kepentingan yang ada dan sinergi partisipasi aktif (integrasi dan peningkatan bersama) antara pemerintah, swasta, atau industri pariwisata, dan masyarakat terkait. Bentuk yang relevan dari peran serta masyarakat mengawasi dan mengelola pengembangan pariwisata yang ada dengan membantu membentuk visi, misi dan tujuan pengembangan pariwisata, identifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan digunakan untuk pengembangan, serta pengelolaan daya tarik wisata.

### C. METODE

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengungkap keadaan sebenarnya yang mungkin tersembunyi (Moleong, 2006).

#### 2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada teori *Community-Based Tourism*. Timothy dan Boyd (2003) menyebutkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengambil peran dalam berbagai manfaat pariwisata.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang datanya sesuai dengan data yang diperlukan, baik untuk kepentingan pengumpulan data primer maupun data sekunder.

### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Wisata Bahari Tlocor

Secara umum tujuan pengembangan Pariwisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mendorong

terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui potensi desa dan memperkuat masyarakat desa. Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sudah cukup baik dimana pengelola dan masyarakat setempat sudah bekerja sama dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor.

Keberhasilan yang dicapai setelah melakukan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, diantaranya:

- a) Terjadi peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi dan masyarakat sadar akan pentingnya sebuah tempat wisata.
- b) Pengembangan objek pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Bahari Tlocor Desa secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja dan tempat usaha. Tempat wisata yang dikelola dengan baik memberikan peluang bagi puluhan orang bisnis dan menyediakan lapangan kerja bagi puluhan hingga ratusan orang.
- c) Dengan melakukan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat sadar bahwa tidak hanya berpikir mengenai cara mendapatkan pekerjaan, namun mulai berpikir bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan.

Perkembangan yang terjadi di Wisata Bahari Tlocor dikarenakan adanya kemungkinan yang dapat digali dan dikembangkan dari objek wisata tersebut. Pesona Wisata Bahari Tlocor ini terletak pada Wisata alam, lebih tepatnya Sungai Porong.

Berdasarkan hasil survei kepariwisataan Bahari Tlocor dapat menetapkan wisatanya memenuhi aspek unsur kepariwisataan. Pemenuhan ini dapat dilihat Kolaborasi Masyarakat Lokal yang ada dikawasan Wisata atau Dusun Tlocor pada beberapa tempat wisata yang merupakan hasil pemanfaatan potensi alam

dan seni Dusun Tlocor. Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Wisata bahari Tlocor Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo bisa menarik wisatawan berkat suasana hutannya mangrove yang keren.

Tahap-tahap pengembangan Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah:

- a) Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur mendukung pengembangan masyarakat melalui program desa tematik. Melalui program ini, sektor-sektor potensial pertanian dan perikanan akan dialiri listrik dan diberdayakan untuk memutar roda perekonomian. Salah satunya adalah Desa Tematik Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang baru saja diluncurkan. Wisata Bahari Tlocor merupakan wisata alam yang menghadap ke hutan bakau di kanan kiri sungai. Beberapa perahu dan speed boat bersandar di dermaga siap mengantarkan pengunjung menyusuri sungai menuju Pulau Lusi. PLN mendukung stasiun pengisian daya umum (SPLU), motor listrik, kompor induksi, dan fasilitas pendukung lainnya. Tujuan dari meresmikan desa tematik ini adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi mereka dengan menggunakan listrik untuk kegiatan sehari-hari, dan diharapkan listrik dapat digunakan untuk memompa tambak di sekitarnya.
- b) Dibangunnya tower wifi untuk memudahkan akses internet masyarakat Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
- c) Dibangunnya antena radio untuk memudahkan informasi masyarakat Desa

Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

- d) Pembangunan *Tourist Information Center* (TIC) dibangun sebagai pusat informasi bagi wisatawan.
- e) Kehadiran BUMDes dan pendirian *homestay* di setiap desa akan memberikan kesempatan wisatawan yang berkunjung ke Wisata Bahari Tlocor untuk mengunjungi Desa Kedungpandan. Peran BUMDesnya sebagai wadah kegiatan pembangunan Desa Kedungpandan menjadi desa wisata.
- f) Rest area terintegrasi dengan kafe, Warung ikan bakar, dan kantor sekretariat bersama antara BUMDes dan POKDARWIS. Pembukaan kawasan wisata laut Tlocor sebagai destinasi wisata dan penyediaan tempat istirahat akan memungkinkan wisatawan untuk menikmati wisata alternatif lain yang dekat dengan objek wisata utama dan lebih mengeksplorasi Desa Kedungpandan. Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
- g) Pelatihan manajemen *homestay*. *Homestay* yang menyatu dengan rumah penduduk atau masyarakat dimaksudkan untuk membantu wisatawan lebih mengenal daerah tersebut dan mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemilik *homestay*.

## 2. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Wisata Bahari Tlocor

Untuk melakukan pengembangan pariwisata dibutuhkan suatu strategi agar pengembangan pariwisata dapat berjalan lancar. Strategi pengembangan pariwisata merupakan satu kesatuan program yang menyeluruh dan terintegrasi dengan unsur-unsur pemerintahan, sektor swasta, masyarakat dan akademisi untuk mempelajari kendala dan kondisi lingkungan internal dan layanan pariwisata eksternal untuk menjadikannya tujuan wisata yang berkelanjutan dan sangat kompetitif. Salah

satu strategi yang paling intensif untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan berdasarkan prinsip pemberdayaan berbasis pada masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat adalah kegiatan pariwisata yang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan dimiliki dan pengelolaannya ada pada tingkat masyarakat dengan mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan melindungi sumber daya serta nilai-nilai budaya yang ada. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu bentuk pengembangan pariwisata yang lebih ditekankan pada partisipasi masyarakat didalamnya. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi menjadi pemain utama dalam bermacam-macam kegiatan wisata, sehingga manfaat pariwisata seluruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat disekitar tempat wisata.

Strategi pengembangan pariwisata adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan pengembangan dan atau perlu perbaikan terhadap sarana prasarana yang ada baik itu secara fisik maupun nonfisik, sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar daerah tujuan Wisata dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung Wisata Bahari Tlocor. Dalam mendukung pengembangan pariwisata, Pengelola Pariwisata (POKDARWIS) dan BUMDes membuat keputusan bersama untuk meningkatkan daya tarik Wisata Bahari Trocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan cara meningkatkan daya tarik Wisata Bahari Tlocor, strategi yang digunakan pengelola pariwisata dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor yaitu dengan memperhatikan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan pengembangan objek wisata.

Faktor yang turut berkontribusi terhadap pengembangan objek pariwisata meliputi:

a) Daya Tarik Wisata

Atraksi yang dikembangkannya dengan memasukkan potensi laut berupa kegiatan penangkapan ikan. Itu alasan objek wisata ini dikembangkan adalah karena kualitas sumber daya alam Sungai Porong masih alami dan baik, sehingga banyak potensi yang dapat dieksplorasi. Pada dasarnya Sungai Porong merupakan tempat atau spot memancing yang populer, dan banyak orang yang datang ke sungai Porong untuk menangkap ikan. Namun, karena rencana pelaksanaan pembangunan masih memiliki kendala. Kendala tersebut antara lain kekurangan dana dan kekurangan tenaga kerja. Pendanaan langka karena Wisata Bahari Tlocor merupakan wisata yang dikembangkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Atraksi lain yang ada di Wisata Bahari Tlocor Wahana olahraga air jet ski tersedia untuk tempat wisata yang memanfaatkan potensi alam sungai Porong. Sedangkan pertunjukan musik seperti pertunjukan orkestra merupakan sumber daya wisata yang memanfaatkan kesenian. Ketersediaan tempat-tempat wisata ini dimaksudkan untuk dapat untuk mendukung dan membangkitkan minat wisatawan selain tujuan utama Pulau Lusi.

b) Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang memadai membuat wisatawan mudah menjangkau Wisata Bahari Tlocor karena sarana prasarana yang memadai akan mendorong pertumbuhan baru dalam pengembangan sebuah pariwisata dan mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Sarana prasarana pada sebuah destinasi wisata merupakan sumber daya yang mutlak yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata di sebuah destinasi wisata.

Sarana prasarana yang tersedia di Wisata Bahari Tlocor sudah maksimal

yaitu seperti dermaga, ruang tunggu (*shelter*), *speed boat* atau jet ski, dan pelampung berenang. Selain fasilitas tersebut, terdapat fasilitas umum lainnya seperti tempat parkir, mushola, toilet, hingga tempat sampah. Wisata Bahari Tlocor juga telah melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang seperti warung atau rumah makan dan *homestay* yang menunjang kegiatan perjalanan wisata. Beberapa fasilitas yang ada dalam kondisi cukup baik, namun tentunya selalu dikembangkan.

### 3. Tarif Masuk Area Wisata Bahari Tlocor

Posisi Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagai pintu masuk menuju wisata Bahari Tlocor inilah yang membuat Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi berupa pemungutan tiket masuk bagi semua pengunjung di Wisata Bahari Tlocor.

- Tiket masuk Wisata Bahari Tlocor. Untuk masuk ke Wisata Bahari Tlocor sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Tiket perahu dan *speed boat* ke Pulau Lusi Wisata Bahari Tlocor. Untuk bisa ke Pulau Lusi kita bisa naik bus air dan *speed boat* yang sudah disiapkan oleh pengelola pariwisata Tlocor. Untuk harga tiket bus air ke Pulau Lusi, pulang perangnya Rp. 25.000 untuk dewasa, anak-anak Rp. 15.000, dan balita Rp. 5000. Untuk tiket *speed boat* Rp. 200.000 maksimal 3 orang.

### 4. Perkembangan Kunjungan Wisata Bahari Tlocor

Pengunjung Wisata Bahari Tlocor mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi pengunjung yang ramai hanya pada hari Minggu, sedangkan pada hari biasa seperti hari senin sampai hari sabtu sangat sepi.

Melihat hal ini pemerintah beserta *stakeholder* terkait seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Keratif

Kabupaten Sidoarjo, Pokdarwis, BUMDes harus memberikan perhatian yang lebih terhadap Wisata Bahari Tlocor agar pengembangan wisata ini bisa berjalan optimal. Selain pemerintah, masyarakat memiliki peran penting untuk secara bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan dan mendukung pembangunan objek wisata Pulau Lusi. Peran masyarakat dalam pengembangan objek wisata yang lebih utuh dan komprehensif diwujudkan dalam sebuah kelompok yang dikenal dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor dikategori rendah. Kondisi ini dikarenakan hanya beberapa masyarakat sekitar Pulau Lusi yang berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas di Pulau Lusi mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan sebagai pemantau atau evaluator.

Sistem pengelolaan Pulau Lusi masih dalam tanggung jawab sepenuhnya bagi Kementerian Kelautan Perikanan sehingga ada batasan dari pihak pengelola untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi wisata Pulau Lusi dan belum ada badan pengelola Pulau Lusi dari masyarakat seperti POKDARWIS.

Masyarakat memiliki partisipasi yang rendah dalam perencanaan, karena hanya sebagian masyarakat Pulau Lusi saja yang terlibat berpartisipasi dalam perencanaan seperti pada pembuatan program yang terlibat hanya beberapa buruh yang dipekerjakan dan 3 orang yang mewakili masyarakat Pulau Lusi sebagai pengelola dermaga untuk terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana.

**Tabel 4.1. Jumlah Pengunjung Wisata Bahari Tlocor**

| No | Tahun | Bulan    | Jumlah Pengunjung |
|----|-------|----------|-------------------|
| 1  | 2022  | Oktober  | 5.602 orang       |
| 2  | 2022  | November | 4.848 orang       |
| 3  | 2023  | Januari  | 7.651 orang       |

Sumber: Diolah oleh penulis

## 5. Kelembagaan dan Aktor Pemberdayaan Pengembangan Berbasis Masyarakat di Wisata Bahari Tlocor

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama implementasi pemerintahan di berbagai negara di dunia. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan digunakan konsep segitiga pelaku pembangunan berkelanjutan. Menurut ide segitiga pembangunan berkelanjutan terdapat tiga elemen utama pembangunan, diantaranya keseimbangan negara (pemerintahan, pemerintah daerah, dan desa), masyarakat, serta perusahaan swasta (dunia usaha).

Dalam dunia bisnis, konsep segitiga pembangunan berkelanjutan juga dapat diadopsi mewujudkan konsep pemberdayaan. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan keseimbangan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam dunia usaha dapat dilakukan melalui pengendalian faktor sosial. Dalam hal ini, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, kami mengelola masyarakat terdampak di sekitar lokasi perusahaan kami.

Dalam mengembangkan sebagai perangkat pemberdayaan desa wisata masyarakat Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terdapat tiga aktor atau kelompok kepentingan yang merupakan bagian penting dari dimensi kelembagaan, diantaranya:

- a) Perwakilan otoritas (lembaga pemerintahan): Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Sidoarjo serta Badan Usaha Milik Desa.
- b) Perwakilan dari masyarakat: Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).
- c) Perwakilan dari dunia usaha: pengusaha penginapan mewah.

## 6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wisata Bahari Tlocor

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan proses panjang yang didukung oleh pemerintah setempat. Perkembangan sektor pariwisata di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagai contoh upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah ketika dampak ekonominya terasa tumbuh atau makin meningkat.

Peran BUMDes secara umum tidak hanya untuk pengembangan desa wisata karena terdapat usaha lain, selain usaha di BUMDes sektor pariwisata. Pada matriks berikut ini tugas pokok dan fungsi (peran) BUMDes Wisata Bahari Tlocor, diantaranya:

- a) Melaksanakan pemungutan retribusi, pada semua zona pariwisata.
- b) Melaksanakan rekapitulasi perolehan dan retribusi.
- c) Melaporkan hasil pemungutan retribusi kepada pemerintah desa.

## 7. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Sebagai Aktor Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Wisata Bahari Tlocor

Pembentukan Pokdarwis bertujuan untuk mengembangkan kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan kesediaan bertindak sebagai tuan rumah yang baik di kawasan wisata. Agar dapat mengetahui peran pengembangan produk Pokdarwis Obyek Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Bentuk kegiatan POKDARWIS dalam melestarikan Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, seperti penanaman mangrove hingga penanaman bibit pohon

produktif. Dan masyarakat yang ikut tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata hanya sebagian besar, meskipun sebagian besar masyarakat tidak terlibat bahkan tidak mengerti tentang ekowisata.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, artinya tidak semua masyarakat ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat berperan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal yang timbul dari aspek alam, sosial budaya, atau ekonomi masyarakat. Proses pengembangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai komponen kunci dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat dan kelembagaan memainkan peran kunci dalam manajemen dan pengembangan ekowisata Bahari Tlocor. Inisiatif dan partisipasi masyarakat dapat memobilisasi dan mengatur mereka mengambil tindakan kolektif pengelolaan ekowisata Bahari Tlocor.

Partisipasi masyarakat dalam pembibitan mangrove dan ekowisata adalah tanda lain dari peningkatan kapasitas masyarakat. Ini bertujuan untuk mengembangkan dukungan yang kuat menuju pengelolaan mangrove yang berkelanjutan meningkatkan taraf hidup masyarakat mengurangi tekanan secara lokal hutan mangrove. Bentuk partisipasi masyarakat melalui pengelolaan dan pembangunan ekowisata mangrove menjadi pusat perhatian wisata di dalam dan luar Pulau Lusi.

#### **8. Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor**

Pengambilan keputusan adalah proses evaluasi terkait alternatif menetapkan tujuan pribadi atau organisasi agar tujuan yang

dicapai dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan sektor lainnya.

Untuk itu pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu menciptakan peluang pekerjaan, kesempatan berusaha, dan mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat agar mengetahui manfaat pariwisata (Timothy, 1999). Untuk perencanaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata diperlukan proses perencanaan yang cermat, terarah dan terencana terpadu sebagai acuan pengembangan pariwisata berkelanjutan, tetapi juga fungsi dan tujuan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan keterlibatan masyarakat (POKDARWIS) dan BUMDes.

Dalam pengambilan keputusan bertujuan untuk pengembangan Wisata Bahari Tlocor yaitu dengan mengembangkan sarana prasarana di Wisata Bahari Tlocor. Sarana prasarana yang memadai membuat wisatawan mudah menjangkau Wisata Bahari Tlocor karena sarana prasarana yang memadai akan mendorong pertumbuhan baru dalam pengembangan sebuah pariwisata dan mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur pada sebuah destinasi wisata merupakan sumber daya yang mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan akifitas mereka dan wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata di sebuah destinasi wisata, seperti infrastruktur yang ada di Wisata Bahari Tlocor ini yaitu listrik dan *rest area*.

## 9. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata

### a) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Langkah awal yang dilakukan untuk memulai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membentuk pengurus yang berasal dari masyarakat setempat yang bertujuan sebagai kelompok yang bertugas untuk mengembangkan desa wisata sekaligus sebagai ujung tombak serta penggerak masyarakat.

Perlunya sebuah pengurus dalam pemberdayaan masyarakat sebelumnya bahwa untuk memulai sebuah proses pemberdayaan masyarakat yaitu dengan terlebih dulu untuk menciptakan sebuah pengurus (kelompok) yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai itu semua maka pemerintah Desa Kedungpandan menetapkan pengurus yang telah dibentuk yaitu POKDARWIS, selanjutnya menjalankan aksi untuk pengembangan program mengenai konservasi lingkungan.

Selain itu dengan adanya pengurus ini bertindak sebagai penggerak masyarakat agar dapat terlibat secara aktif pada segala aspek pelaksanaan program desa wisata budaya. Adanya pengurus kelompok sadar wisata ini juga dapat meningkatkan keikutsertaan maupun partisipasi masyarakat serta memudahkan dalam pengorganisasian masyarakat.

### b) Pendampingan Masyarakat

Proses pendampingan dalam rangka pengembangan Wisata Bahari Tlocor ini juga dilakukan oleh BUMDes dan POKDARWIS yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa Kedungpandan. Misalnya melestarikan wisata alam Pulau Lusi dalam rangka membudidayakan mangrove. Peran pendamping di wisata Bahari Tlocor pada awalnya adalah sebagai motivator dan fasilitator, yaitu berupaya untuk menyadarkan dan

mendorong masyarakat untuk mengenali potensi serta masalah yang ada di desa tersebut untuk mengembangkan potensi tersebut kemudian akan memecahkan permasalahan yang selama ini terdapat dalam Wisata Bahari Tlocor.

Selanjutnya terdapat tahap pelaksanaan, peran pendamping berusaha untuk memberikan pengarahan pada setiap pemandu wisata, pengelolaan objek-objek wisata, manajemen wisata, pembukuan tentang wisata, dan kuliner. Pada tahap ini, peran pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, memfasilitasi terjadinya kerjasama dalam kelompok, dan mengkondisikan iklim kelompok agar dapat harmonis.

Hanya sampai pada tahap pelaksanaan pemberdayaan, peran pendamping yang dilakukan juga berlanjut ke paska pendampingan yaitu sebagai katalisator. Dalam hal ini, pendampingan sebagai penghubung antara kelompok masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Wisata Bahari Tlocor.

## 10. Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor

### a) Kurangnya Biaya

Dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor, pengelolaan pariwisata mendapatkan kontrol lebih besar atas Wisata Bahari Tlocor. Mereka menghabiskan tabungan mereka sendiri, dikarenakan tidak ada dukungan nyata dari pemerintah. Apabila dalam perjalanan Wisata Bahari Tlocor mendapat bantuan materi dari pemerintah, kemungkinan besar wisata ini dapat berkelanjutan dan dapat dikelola. Tidak perlu harus menunggu patungan dari pengelola terlebih dahulu.

### b) Kurang Giatnya Promosi Objek Wisata

Kurangnya giatnya promosi yang dilakukan oleh Wisata Bahari Tlocor melalui media elektronik dan media



sosial. Biasanya melalui media elektronik iklan di televisi dan radio. Media sosial biasanya melalui aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Jika promosi Wisata Bahari terus dilakukan, tidak akan menutup kemungkinan akan semakin digencarkan banyak wisatawan dari berbagai daerah dapat berkunjung ke Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi.

Yang menjadi penghambat dalam promosi Wisata Bahari Tlocor juga adalah kurangnya dana dalam melakukan promosi dan Pulau Lusi masih dimiliki dan menjadi kewenangan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Hal ini membuat Pokdarwis tidak berdaya mengelola secara optimal pengembangan pariwisata Pulau Lusi.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Terkait dengan menurunnya jumlah wisatawan yang mengunjungi Wisata Bahari Tlocor, maka perlunya melakukan promosi lebih giat, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyadarkan akan pentingnya ekowisata dalam meningkatkan perekonomian, dan perlu adanya pengembangan sejumlah fasilitas oleh wisatawan yang mau berkunjung ke Wisata Bahari Tlocor.

Wisata Bahari Tlocor adalah sebuah ekowisata yang memanfaatkan muara Sungai Porong sebagai objek wisata, memberikan objek wisata ini keunikan tersendiri bagi Wisata Bahari Tlocor tersebut. Wisata Bahari Tlocor menawarkan pemandangan alam seperti hutan bakau di kanan kiri tepian sungai, suasana alam di sekitar Sungai Porong, dan keunikan Pulau Baru atau Pulau Lusi. Wisata Bahari Tlocor memiliki sasaran utama sebagai tujuan wisatawan berkunjung, objek ini adalah Pulau Lusi. Pulau hasil pengerukan endapan Lumpur Lapindo yang dibuang ke Sungai Porong kemudian dibenamkan dan diolah sehingga dapat menjadi objek wisata yang menarik dengan

menyuguhkan keindahan alam yang masih alami.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Bahari Tlocor cukup baik untuk mengembangkan objek Wisata Bahari Tlocor dimana pengelola dan komunitas bekerjasama untuk pengembangan objek Wisata Bahari Tlocor ini. Peran pengelola dan komunitas lokal yang mendukung pengembangan Wisata Bahari Tlocor dikatakan cukup berhasil. Promosi pariwisata yang dilakukan pengelolaan dengan menerapkan rencana pengembangan pariwisata yang menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung tugas serta fungsi.

#### **a) Promosi Wisata**

Promosi wisata yang dilakukan oleh Wisata Bahari Tlocor pun dilaksanakan melalui dua sarananya yaitu media sosial dan media elektronik. Keduanya dilakukan untuk menarik wisatawan ke Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi. Apabila promosi masih sedikit dilakukan, orang tidak akan tahu seperti apa Wisata Bahari Tlocor ini. Promosi pariwisata bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan suatu destinasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran di kalangan wisatawan tentang nilai penting dari destinasi tersebut.

#### **b) Infrastruktur**

Infrastruktur yang ada di Wisata Bahari Tlocor cukup memadai. Namun, untuk infrastruktur yang ada di Pulau Lusi sudah rusak dan perlu melakukan renovasi, seperti kerusakan ruang pertemuan, mushola, toilet, dan sumur yang kotor. Mungkin karena Pokdarwis tidak berwenang menambah fasilitas, karena Pulau Lusi masih dimiliki dan menjadi Kewenangan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Hal ini membuat Pokdarwis tidak berdaya mengelola secara optimal pengembangan pariwisata Pulau Lusi.

- c) Sarana Prasarana  
Sarana dan prasarana di Wisata Bahari Tlocor sudah memadai. Namun sarana prasarana yang ada di Pulau Lusi masih kurang minimum. Contohnya tempat duduk yang masih terbuat dari kayu, sedikit wahana, serta belum adanya mainan untuk anak-anak.
- d) Perencanaan Pengembangan  
Rencana pengembangan yang dilakukan oleh pengelola Pariwisata Bahari Tlocor sudah cukup bagus. Mereka mampu bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan secara gratis tower wifi, antena radio, perahu, bangunan garansi untuk perahu, dan bus yang diperuntukan untuk wisatawan yang berkunjung ke Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi.
- d) Dalam promosi harus lebih digencarkan lagi. Contohnya melakukan vlog dan mengupload di Youtube, Facebook, dan media sosial lainnya. Karena zaman sekarang, penggunaan Youtube, Facebook, dan media lainya semakin meningkat.
- e) Jika dalam pengelolaan, Pokdarwis belum memiliki wewenang dan dianjurkan kepada pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk segera mengeluarkan surat izin pengelolaan.
- f) Pentingnya kerja sama biro perjalanan (biro travel) dalam membantu memberikan beragam informasi mengenai berbagai tempat liburan sesuai yang Anda inginkan.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan menurunnya wisatawan yang mengunjungi Wisata Bahari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, peneliti memberikan saran untuk mengatasi masalah yang ada. Adapun saran sebagai berikut:

- a) Dalam pengembangan objek Wisata Bahari Tlocor, pengelola diharap terus mengupayakan masa depan dalam merencanakan pengembangan Pariwisata Bahari Tlocor ini. Seiring dengan itu, minat wisatawan terhadap Wisata Bahari Tlocor dan Pulau Lusi ini semakin meningkat.
- b) Pengelola Wisata Bahari Tlocor diharapkan dapat memelihara keindahan alam Wisata Bahari Tlocor. Karena itu menjadi daya tarik tersendiri yang memikat hati para wisatawan yang mengunjungi Wisata Bahari Tlocor ini.
- c) Saat menggunakan biaya dalam pengelolaan Pulau Lusi masih mengalami kekurangan, dianjurkan untuk meminta pemerintah mengenai hal itu untuk bantuan materi.
- Adi, & Isbandi, R. (2013). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Amerta, I. G., & Budhiasa, I. G. (2013). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel, dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2001-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 3(2), 56–69.
- Adiyoso, W. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Barreto, M., & Giantari, I. G. A. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(11), 779–788.
- Bambang, S. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Cooper, C., & Stephen, J. (1997). *Destination Life Cycle: The Isle Of Man Case Study In Lesley France The Earthscan Reader In*

- Sustainable Tourism*. UK: Earthscan Publication Limited.
- Hamzah. (2014). *Variabel Penelitian dalam Pendidikan dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Ina Publikatama.
- López-Guzmán, T., Sánchez-Cañizares, S., & Pavón, V. (2011). Community - Based Tourism In Developing Countries: A Case Study. *Tourismos*, 6(1), 69–84.
- Mathieson, & Wall. (1982). *Tourism: Economics, Physical, and Social Impacts*. New York: Long Man.
- Maryani. (1991). *Pengantar Geografi Pariwisata*. Bandung: IKIP Bandung.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 121–138.
- Park, et.al. (2011). Inguinal Hernia Repair in Overweight and Obese Patients. *Journal Korean Surg Soc*, 81(3), 625–646.
- Ramly, N. (2007). *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Spillane, & James, J. S. J. (2019). *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi, dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, R. I. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal pengembangan SDM*, 1(2), 23–44.
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Yoeti, & Oka, A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yoeti, & Oka, A. (1983). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, & Oka, A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Zaenuri, M. (2012). *Perencanaan Strategis Kepariwisataaan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: e-Gov Publishing.

